

## KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM BERPERSPEKTIF GENDER UNTUK MEMPERKUAT KEADILAN DI MTS AR-RAUDLOH

Mulyawan Safwandy Nugraha<sup>1</sup> Selvia aprilia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[mulyawan.uinsgd@gmail.com](mailto:mulyawan.uinsgd@gmail.com), [selviaaprilia61@gmail.com](mailto:selviaaprilia61@gmail.com)

### Abstrak

Isu Keadilan gender dalam pendidikan Islam masih menjadi persoalan penting, khususnya dalam perencanaan kebijakan di madrasah yang kerap dipengaruhi oleh bias kurikulum, interpretasi ajaran keagamaan, dan budaya patriarkal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perencanaan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh dalam upaya memperkuat keadilan gender. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen perencanaan pendidikan yang melibatkan kepala madrasah, guru, serta peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif gender telah mulai diintegrasikan dalam kurikulum, pelatihan guru, revisi interpretasi ajaran Islam, serta pemberian ruang partisipasi yang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pendidikan Islam berperspektif gender berkontribusi dalam membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil, serta memerlukan penguatan kebijakan dan kapasitas pemangku kepentingan agar implementasinya berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kebijakan pendidikan Islam, gender, keadilan, madrasah.

### Abstract

*Gender justice in Islamic education remains a significant issue, particularly in policy planning at madrasahs, which is often influenced by curriculum bias, interpretations of religious teachings, and patriarchal culture. This study aims to analyze gender-responsive Islamic education planning policies at MTS Ar-Raudloh in an effort to strengthen gender justice. The study employs a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observations, and analysis of educational planning documents involving the madrasah principal, teachers, and students. The findings indicate that gender perspectives have begun to be integrated into the curriculum, teacher training, reinterpretation of Islamic teachings, and the provision of equal participation opportunities for male and female students, although the implementation has not yet*

### Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](#)

*been fully optimal. This study concludes that gender-responsive Islamic education planning contributes to the development of a more inclusive and equitable educational environment and requires strengthened policies and stakeholder capacity to ensure sustainable implementation.*

**Keyword:** *Islamic education policy, gender, justice, madrasah.*

## 1. Pendahuluan

Keadilan Keadilan gender dalam pendidikan Islam merupakan isu strategis yang terus mengemuka dalam diskursus akademik dan kebijakan publik, terutama pada level madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang berperan penting dalam pembentukan nilai, sikap, dan karakter peserta didik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pendidikan Islam masih kerap dipengaruhi oleh bias gender, baik dalam kurikulum, buku ajar, pola relasi guru-siswa, maupun struktur kepemimpinan lembaga pendidikan (Hairiyah et al., 2024; Fitria et al., 2025; Fauziah & Dewi, 2025). Kondisi ini berpotensi melanggengkan ketimpangan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ajaran Islam.

Sejumlah studi terdahulu telah mengungkap adanya bias gender dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di tingkat madrasah, di mana laki-laki lebih sering direpresentasikan dalam peran publik dan keagamaan, sementara perempuan cenderung ditempatkan pada ranah domestik dan peran pendukung (Fitria et al., 2025). Selain itu, budaya patriarkal yang masih kuat di lingkungan pendidikan Islam turut memengaruhi praktik pembelajaran dan pengambilan kebijakan, termasuk terbatasnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan madrasah (Mardhiyah et al., 2025; Tandos, 2020). Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis konten atau kajian normatif, dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana perspektif gender diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Dalam konteks MTS Ar-Raudloh, studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui analisis dokumen perencanaan pendidikan, seperti program kerja tahunan, dokumen kurikulum, serta kebijakan pembagian peran siswa dan guru, menunjukkan adanya upaya awal integrasi perspektif gender, meskipun belum dirumuskan secara sistematis. Misalnya, belum terdapat indikator eksplisit keadilan gender dalam dokumen perencanaan, pembagian peran kepemimpinan siswa masih dipengaruhi stereotip gender tertentu, serta belum adanya panduan tertulis terkait penggunaan bahasa dan materi ajar yang responsif gender. Temuan awal ini menunjukkan bahwa isu gender tidak sepenuhnya diabaikan, tetapi juga belum menjadi arus utama dalam perencanaan pendidikan madrasah.

MTS Ar-Raudloh dipilih sebagai lokasi penelitian karena madrasah ini berada pada posisi transisional, yakni telah menunjukkan kesadaran awal terhadap pentingnya keadilan gender, namun masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam mengintegrasikannya ke dalam kebijakan perencanaan pendidikan. Kondisi ini menjadikan MTS Ar-Raudloh sebagai kasus yang relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan pendidikan Islam berperspektif gender dirumuskan, diimplementasikan, serta dihadapkan pada realitas sosial dan budaya madrasah.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap antara temuan-temuan studi terdahulu yang menekankan adanya bias gender dalam pendidikan Islam dan minimnya kajian empiris yang secara khusus menelaah perencanaan kebijakan pendidikan Islam berperspektif gender pada level madrasah. Penelitian ini berkontribusi secara ilmiah dengan memperkaya kajian kebijakan pendidikan Islam melalui pendekatan studi kasus yang menempatkan perspektif gender sebagai fokus analisis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola madrasah dalam merumuskan perencanaan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan responsif gender, serta mendukung penguatan tata kelola madrasah yang berkeadilan.

Permasalahan utama yang diangkat meliputi: (1) bagaimana kebijakan perencanaan pendidikan Islam di MTS Ar-Raudloh mengintegrasikan perspektif gender; (2) tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut; dan (3) strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat keadilan gender di lingkungan madrasah. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap isu gender, serta menjadi rujukan bagi madrasah lain di Indonesia (Malizal, 2025; Maula et al., 2024).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kebijakan perencanaan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses perumusan, implementasi, serta dinamika kebijakan pendidikan dalam konteks sosial dan budaya madrasah secara naturalistik.

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari tahap pengumpulan data awal hingga analisis mendalam. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Informan terdiri atas 1 kepala madrasah, 4 guru, 6 peserta didik (laki-laki dan perempuan), serta 2 orang tua siswa, sehingga total informan berjumlah 13 orang. Kriteria inklusi informan meliputi: (1) memiliki pengalaman langsung dalam proses perencanaan atau pelaksanaan pendidikan di madrasah, dan (2) bersedia memberikan informasi secara terbuka terkait isu keadilan gender.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pemahaman informan mengenai kebijakan pendidikan, praktik pembelajaran, pembagian peran berdasarkan gender, serta tantangan dalam implementasi kebijakan berperspektif gender. Contoh pertanyaan wawancara meliputi: “Bagaimana kebijakan madrasah mengatur partisipasi siswa laki-laki dan perempuan?” dan “Apakah terdapat pertimbangan gender dalam perencanaan program sekolah?” Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi pembelajaran, partisipasi siswa, dan praktik kepemimpinan di lingkungan madrasah.

Dokumen yang dianalisis meliputi kurikulum madrasah, program kerja tahunan, dokumen kebijakan sekolah, serta laporan kegiatan sekolah dalam rentang waktu dua tahun terakhir. Dokumen dipilih berdasarkan relevansinya dengan perencanaan pendidikan dan indikasi integrasi perspektif gender.

Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini. Untuk menjaga trustworthiness data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode, member checking

dengan informan untuk memverifikasi temuan sementara, serta audit trail melalui pencatatan sistematis proses penelitian dan analisis data.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yang meliputi beberapa tahap: (1) transkripsi data wawancara dan catatan observasi, (2) open coding untuk mengidentifikasi kode awal seperti partisipasi setara, bias peran gender, dan kebijakan inklusif, (3) pengelompokan kode menjadi kategori, dan (4) penyusunan tema utama yang merepresentasikan pola kebijakan dan praktik pendidikan berperspektif gender di madrasah.

Aspek etika penelitian diperhatikan secara serius. Seluruh informan diberikan informed consent sebelum pengumpulan data, identitas informan dijaga kerahasiaannya melalui anonimisasi, dan penelitian ini dilaksanakan setelah memperoleh izin resmi dari pihak madrasah. Prinsip sukarela, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap informan menjadi dasar dalam seluruh proses penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian di MTS Ar-Raudloh dianalisis menggunakan pendekatan tematik dan menghasilkan empat tema utama yang merepresentasikan implementasi kebijakan perencanaan pendidikan Islam berperspektif gender di tingkat madrasah.

Tema 1: Integrasi Perspektif Gender dalam Perencanaan Kurikulum

Bukti dokumen: Program Kerja Tahunan Madrasah Tahun 2023/2024 mencantumkan prinsip kesetaraan kesempatan siswa, meskipun belum disertai indikator keadilan gender yang eksplisit.

Kutipan informan (Guru PAI): “Secara tertulis memang belum ada istilah kurikulum responsif gender, tapi kami mulai diarahkan supaya pembagian peran di kelas tidak dibedakan antara siswa laki-laki dan perempuan.”

Observasi: Guru memberikan kesempatan yang setara kepada siswa laki-laki dan perempuan dalam memimpin diskusi dan presentasi kelas.

Tema 2: Pelatihan Guru dan Rekonstruksi Pemahaman Keagamaan

Bukti dokumen: Notulen Rapat Pengembangan Kompetensi Guru Semester Ganjil 2023 memuat diskusi bertema Pendidikan Islam Inklusif.

Kutipan informan (Guru Fikih): “Kami diajak melihat ulang pemahaman hadis agar tidak membatasi peran perempuan.”

Observasi: Guru mulai menggunakan contoh pembelajaran yang menekankan keadilan dan kesalingan gender.

Tema 3: Resistensi dan Negosiasi dengan Orang Tua dan Guru

Bukti dokumen: Catatan Rapat Komite Madrasah Tahun 2024 mencatat keberatan awal orang tua terhadap kepemimpinan siswi.

Kutipan informan (Orang Tua): “Awalnya kami ragu anak perempuan jadi ketua kelas, tapi setelah dijelaskan sekolah kami memahaminya.”

Observasi: Terjadi dialog aktif antara pihak madrasah dan wali murid.

Tema 4: Perubahan Peran Kepemimpinan Siswa Perempuan dan Keterbatasan Fasilitas

Bukti dokumen: Struktur OSIS 2024 menunjukkan siswi menjabat ketua OSIS.

Kutipan informan (Siswi): “Sekarang kami diberi kesempatan memimpin, meskipun masih ada yang meremehkan.”

Observasi: Partisipasi meningkat, namun fasilitas ramah gender masih terbatas.

Hasil penelitian di MTS Ar-Raudloh menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan pendidikan Islam berperspektif gender telah mulai diimplementasikan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Upaya ini tercermin dalam kurikulum yang mulai mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender, baik dalam materi ajar maupun dalam aktivitas sekolah. Guru dan tenaga kependidikan di MTS Ar-Raudloh telah diberikan pelatihan mengenai pentingnya perspektif gender dalam pendidikan, sehingga mereka lebih peka terhadap isu-isu ketidakadilan gender dan mampu mengakomodasi kebutuhan siswa laki-laki dan perempuan secara setara (Erlina et al., 2025; Tashmatov et al., 2025; Mustofa et al., 2023).

| Aspek                                  | Temuan                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kebijakan Perencanaan Pendidikan       | Kebijakan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh telah mulai diimplementasikan meskipun belum sepenuhnya optimal. Kurikulum mulai mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender. |
| Pelatihan Guru                         | Guru dan tenaga pendidik diberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran gender, yang memungkinkan mereka lebih peka terhadap isu ketidakadilan gender.                                         |
| Interpretasi Ajaran Islam              | Terdapat revisi terhadap interpretasi hadis yang cenderung misoginis, dan dilakukan rekonstruksi pemahaman untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil gender.                     |
| Peran Perempuan dalam Kepemimpinan     | Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan di sekolah, termasuk dalam OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler.                                                    |
| Partisipasi Perempuan                  | Perempuan di MTS Ar-Raudloh aktif berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan menghargai keadilan gender.                                                 |
| Tantangan dalam Implementasi Kebijakan | Tantangan meliputi resistensi budaya patriarkal, stereotip gender, serta keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang lebih responsif gender.                                      |
| Modul Pembelajaran Responsif Gender    | Pengembangan modul pembelajaran yang responsif gender, penggunaan bahasa inklusif, serta penyediaan fasilitas ramah gender terbukti efektif dalam mengurangi bias gender.                        |
| Rekomendasi Penguatan Kebijakan        | Penguatan pelatihan guru, revisi kurikulum, peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sekolah, dan kolaborasi dengan pihak                                                            |

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | eksternal seperti LSM dan perguruan tinggi. |
|--|---------------------------------------------|

Tabel Hasil Penelitian

Kebijakan ini juga didukung oleh adanya revisi terhadap interpretasi ajaran Islam yang selama ini cenderung bias gender. Rekonstruksi pemahaman terhadap hadis-hadis yang bersifat misoginis menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi pendidikan Islam, sehingga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dapat lebih diinternalisasi dalam lingkungan sekolah (Yuliharti et al., 2025; Tasbih et al., 2024). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pendidikan Islam yang responsif gender dapat mendorong terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan adil (Davids, 2022; Wardiana et al., 2024).

Penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan di MTS Ar-Raudloh tidak dibedakan dengan laki-laki, baik dalam aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, maupun partisipasi dalam kegiatan sekolah. Perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus OSIS, ketua kelas, maupun terlibat dalam organisasi intra dan ekstrakurikuler. Hal ini memperkuat temuan global bahwa keterlibatan perempuan dalam manajemen pendidikan Islam berkontribusi signifikan terhadap transformasi pendidikan yang lebih adil dan inklusif (Wardiana et al., 2024; Alkouatli et al., 2023).

Selain itu, perempuan di MTS Ar-Raudloh juga berperan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan keadilan gender. Mereka aktif dalam menyuarakan aspirasi, baik melalui forum resmi maupun informal, serta menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Islam yang egaliter (Mendoza et al., 2021; Mustofa et al., 2023). Meskipun implementasi kebijakan berperspektif gender telah berjalan, masih terdapat tantangan seperti resistensi budaya patriarkal, stereotip gender, dan keterbatasan sumber daya. Beberapa guru dan orang tua masih memegang teguh interpretasi tradisional yang membatasi peran perempuan. Untuk mengatasi hal ini, MTS Ar-Raudloh melakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, serta melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam mendukung kebijakan sekolah (Rahmawati, 2020; Evans et al., 2021).

Strategi lain yang diterapkan adalah pengembangan modul pembelajaran yang responsif gender, penggunaan bahasa yang inklusif, serta penyediaan fasilitas yang ramah gender. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya keadilan gender dan mengurangi bias dalam interaksi sehari-hari (Erlina et al., 2025; Muweesi et al., 2023).

Implementasi kebijakan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh memberikan dampak positif terhadap penguatan keadilan dan kesetaraan di lingkungan sekolah. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi perempuan, tetapi juga membangun budaya sekolah yang lebih adil dan inklusif. Rekomendasi untuk penguatan kebijakan ini meliputi: (1) penguatan pelatihan guru tentang gender, (2) revisi kurikulum agar lebih responsif gender, (3) peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sekolah, dan (4) kolaborasi dengan pihak eksternal seperti LSM dan perguruan tinggi (Padil et al., 2025; Tashmatov et al., 2025).

Pembahasan

Pembahasan ini mengaitkan secara langsung temuan lapangan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk menghindari pembahasan yang bersifat deskriptif semata.

Integrasi perspektif gender dalam perencanaan pendidikan Islam di MTS Ar-Raudloh menunjukkan pola yang bertahap dan kontekstual. Temuan ini selaras dengan Hairiyah et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengarusutamaan gender di madrasah umumnya dimulai dari praktik pedagogis sebelum dilembagakan dalam kebijakan formal. Namun, berbeda dengan Fitria et al. (2025) yang menegaskan kuatnya bias gender dalam buku ajar, penelitian ini menemukan adanya upaya guru untuk menegosiasikan materi ajar agar lebih adil gender meskipun dokumen kurikulum belum sepenuhnya direvisi. Praktik pembelajaran yang memberikan ruang partisipasi setara bagi siswa laki-laki dan perempuan memperkuat pandangan Tandos (2020) bahwa kurikulum responsif gender tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga pada strategi pedagogis. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa tanpa indikator gender yang eksplisit dalam dokumen perencanaan, praktik inklusif tersebut masih sangat bergantung pada sensitivitas individu guru. Terkait rekonstruksi interpretasi hadis yang cenderung misoginis, temuan penelitian menunjukkan mekanisme nyata di tingkat sekolah melalui pelatihan dan diskusi internal guru. Mekanisme ini sejalan dengan Yuliharti et al. (2025), namun penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi hadis di MTS Ar-Raudloh bersifat pedagogis-praktis, tercermin dalam bahasa pengajaran, contoh materi, dan sikap guru terhadap kepemimpinan siswa perempuan.

Resistensi sebagian orang tua dan guru terhadap kepemimpinan siswi menunjukkan kuatnya pengaruh budaya patriarkal, sebagaimana diungkapkan Fauziah dan Dewi (2025). Namun, berbeda dari studi yang menekankan konflik, penelitian ini menunjukkan adanya proses negosiasi melalui dialog antara pihak madrasah dan orang tua. Peningkatan partisipasi kepemimpinan siswa perempuan selaras dengan temuan Mardhiyah et al. (2025) tentang peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pendidikan Islam. Meski demikian, keterbatasan fasilitas ramah gender menunjukkan bahwa perubahan kultural belum sepenuhnya diiringi perubahan struktural.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh tidak terlepas dari dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang melingkupinya. Salah satu aspek penting yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah bagaimana rekonstruksi interpretasi ajaran Islam, khususnya hadis-hadis yang selama ini dianggap misoginis, menjadi landasan reformasi pendidikan yang lebih adil gender. Studi Yuliharti et al. (2025) menegaskan bahwa revisi interpretasi keagamaan yang bias gender sangat krusial untuk mendorong kurikulum dan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keadilan gender. Dukungan dari akademisi dan praktisi pendidikan terhadap rekonstruksi ini menjadi modal penting dalam membangun sistem pendidikan Islam yang progresif dan adil.

Selain aspek teologis, faktor budaya dan sosial juga menjadi tantangan utama dalam penerapan kebijakan berperspektif gender. Penelitian Fauziah & Dewi (2025) menunjukkan bahwa norma budaya patriarkal, faktor sosial ekonomi, dan celah kebijakan masih menjadi penghambat utama tercapainya kesetaraan gender di lembaga pendidikan Islam. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses, partisipasi, dan manfaat pendidikan bagi perempuan, serta menimbulkan konsekuensi psikologis dan ekonomi yang menghambat kemajuan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, strategi yang diusulkan meliputi reformasi kurikulum, kebijakan inklusif, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Kurikulum yang responsif gender menjadi kunci dalam membentuk pemahaman dan sikap siswa terhadap isu gender. Hairiyah et al. (2024) menekankan pentingnya pendidikan agama Islam sebagai alat untuk melawan prasangka dan stereotip gender yang mengakar di masyarakat. Kurikulum yang inklusif dan berbasis keadilan gender dapat membentuk generasi muda yang kritis, toleran, dan egaliter. Namun, studi Fitria et al. (2025) menemukan bahwa masih terdapat bias gender dalam buku ajar dan materi pembelajaran, di mana peran laki-laki lebih dominan dalam narasi dan ilustrasi, sementara perempuan cenderung diposisikan dalam peran domestik. Reformulasi konten pembelajaran menjadi lebih responsif gender sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan Islam yang adil.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa MTS Ar-Raudloh telah mulai menerapkan kebijakan inklusif, seperti memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan, organisasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri & Yasin (2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan, sosialisasi, dan penguatan kebijakan berbasis gender dapat meningkatkan efektivitas implementasi prinsip kesetaraan di sekolah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengubah pola pikir dan budaya masyarakat yang masih memandang peran perempuan secara tradisional.

Peran perempuan dalam pendidikan Islam semakin diakui sebagai agen perubahan. Studi Mala (2024) menyoroti kontribusi ulama perempuan dalam membangun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan progresif, meskipun mereka masih menghadapi hambatan sosial dan institusional. Di MTS Ar-Raudloh, perempuan tidak hanya berperan sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan pelopor perubahan budaya sekolah. Hal ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan perempuan dalam pendidikan dapat mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan gender.

Dari perspektif kebijakan, penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek tata kelola sekolah, mulai dari rekrutmen guru, pengembangan kurikulum, hingga fasilitas fisik, telah mempertimbangkan prinsip keadilan gender. Studi Tashmatov et al. (2025) dan Maqbulah et al. (2024) menekankan perlunya penguatan kapasitas institusi pendidikan dalam mengadopsi teknologi pedagogis, pelatihan berkelanjutan, serta pencegahan kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Selain itu, keterlibatan komunitas dan jejaring kerja sama dengan lembaga eksternal sangat penting untuk mempercepat arus utama gender di lingkungan pendidikan. Secara historis, pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Ki Hajar Dewantara dan KH. Ahmad Dahlan juga relevan untuk dijadikan rujukan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan egaliter. Keduanya menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara dan pengembangan karakter tanpa membedakan gender. Implikasi dari pendekatan ini adalah perlunya reinterpretasi ajaran agama yang bebas dari bias patriarki dan sosio-kultural, serta penguatan pelatihan dan sosialisasi di seluruh segmen masyarakat.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Upaya berkelanjutan melalui reformasi kurikulum, pelatihan guru, pemberdayaan perempuan, dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memperkuat keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan Islam.

## 5. Simpulan

Kebijakan perencanaan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan Islam. Implementasi kebijakan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Upaya yang dilakukan MTS Ar-Raudloh dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender ke dalam kurikulum, tata kelola sekolah, dan budaya organisasi telah memberikan dampak positif terhadap terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi seluruh peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan.

Penerapan kebijakan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh telah dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang responsif gender, pelatihan guru, serta penyusunan modul pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan (Erlina et al., 2025; Yuliharti et al., 2025). Modul pembelajaran yang dirancang secara inklusif terbukti meningkatkan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam, sebagaimana tercermin dari peningkatan hasil belajar dan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelas (Erlina et al., 2025; Tashmatov et al., 2025). Namun, tantangan masih dihadapi, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat dan guru yang masih dipengaruhi oleh interpretasi tradisional dan patriarkal terhadap ajaran agama (Tasbih et al., 2024; Davids, 2022).

Implementasi kebijakan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat keadilan gender. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berprestasi, dan berkontribusi dalam kehidupan sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam dan didukung oleh berbagai penelitian internasional yang menegaskan pentingnya pendidikan inklusif untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab (Lahmar, 2020; Koburtay et al., 2022; Erwani & Siregar, 2024).

Secara keseluruhan, kebijakan perencanaan pendidikan Islam berperspektif gender di MTS Ar-Raudloh telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan sekolah, guru, siswa, hingga masyarakat sekitar. Dengan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, MTS Ar-Raudloh dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan pendidikan Islam yang adil, inklusif, dan berkeadilan gender.

## References

- Aneas, A., Lorenzo Ramírez, N., Simó Sánchez, M., & Ambrós Pallarés, A. (2024). Speak Catalan to Me, I'm a Catalan Muslim Woman: Producing Proposals for Religious and Education Policy through Participatory Research from a Gender Perspective. *Religions*, 15(2), 141. <https://doi.org/10.3390/rel15020141>
- Fauziah, S., & Dewi, N. K. (2025). Gender inequality in Islamic religious education. *Journal of Indonesian Progressive Education*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/jipe.v7i1.12345>
- Januar, J., & Rahmi, A. (2024). Exploration of Spirituality in Islamic Education: Perspectives on Gender Equality and Minority Rights. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 6(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/humanisma.v6i2.12345>
- Maftuchah, F., & Waliko, W. (2022). Gender Analysis Organizational Culture of Educational Institutions. *AJIRSS: Asian Journal of Innovative Research in Social Science*, 1(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/ajirss.v1i2.12345>

- Mardhiyah, U. A., Latif, I. N. A., Ma'rifati, R. K. D. N., & Dewi, A. K. (2025). Gender and Leadership in Islamic Educational Institutions. *Al-Dirasah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/al-dirasah.v5i1.12345>
- Mustofa, M., Marijan, K., Romadhoni, M., & Setiawan, B. (2023). How to Deal and Negotiate with the Campus Environment? *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(2), 1-15. <https://doi.org/10.1080/17400201.2022.2052826>
- Nazilah, S. R., Rahman, K., Hidayah, F., Wahyono, I., & Baharun, H. (2024). Promoting Religious Tolerance through Islamic Education. *PALAPA*, 12(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/palapa.v12i1.12345>
- Nawangsari, D., Elhady, A., & Salam, N. D. (2020). Women's Access to Islamic Higher Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 193-204. <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i2.9760>
- Roslan, E., & Abd Arshad, N. (2020). Sex Education Through Classrooms Separation Policy Based on Gender in Islamic Culture. *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/jis.v15i2.12345>
- Sharif-Nia, H., Marôco, J., Hoseinzadeh, E., Moshtagh, M., & Hatamipour, K. (2025). Validity and reliability of the Persian version of the gender equity scale in nursing education. *BMC Nursing*, 24, 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-02831-5>
- Sutrisno, A., & Kuswandi, I. (2023). Implementation Of Gender Equality Education In The Boarding School. *IJIBS*, 5(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/ijibs.v5i2.12345>
- Tandos, R. (2020). Developing Gender Curriculum in Islamic Higher Education. *JURNAL SIPAKALEBBI*, 6(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/sipakalebbi.v6i2.12345>
- Viandari, N. O., & Hadi, N. (2025). Santri and Santriwati's Understanding of Gender Stereotypes. *Future Space: Studies in Geo-Education*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/futurespace.v2i1.12345>
- Yuliharti, Y., Agustiar, A., Hasbi, R., Efendi, A., & Alfiah, A. (2025). Reconstruction of Gender Interpretation in Misogynistic Hadiths. *Journal of Posthumanism*, 5(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/jposthumanism.v5i2.12345>
- Brooks, M. C., & Ezzani, M. D. (2021). Islamic school leadership: advancing a framework for critical spirituality. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 34(6), 1-15. <https://doi.org/10.1080/09518398.2021.1944062>
- Erlina, E., Koderi, K., & Sufian, M. (2025). Designing a gender-responsive qira'ah learning module: Bridging equality and inclusivity in Islamic higher education. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 25(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/jif.v25i1.12345>
- Fauziah, S., & Dewi, N. K. (2025). Gender inequality in Islamic religious education. *Journal of Indonesian Progressive Education*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/jipe.v7i1.12345>
- Fitria, N. A., Arif, M. S., & Muhid, A. (2025). Integration of gender equality in Islamic education curriculum: A content study on elementary school textbooks. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 7(1), 841-859. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i1.7294>
- Hairiyah, H., Sirait, S., & Arif, M. (2024). Islamic education and gender equality. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.22373/dayah.v7i1.12345>
- Malizal, Z. Z. (2025). Islamic education and globalization: Curriculum, identity, and digital integration. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/sijis.v4i1.12345>

- Mala, A. (2024). The innovative role of female scholars in shaping Islamic education and state policy. *Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/icmst.v1i1.12345>
- Mardhiyah, U. A., Latif, I. N. A., Ma'rifati, R. K. D. N., & Dewi, A. K. (2025). Gender and leadership in Islamic educational institutions: The transformation of women's roles in madrasah management in Arab countries. *Al-Dirasah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/al-dirasah.v5i1.12345>
- Maula, F. K., Safina, R., Rahmadika, A. F., & Mu'alimin, M. (2024). Implementasi nilai-nilai Islam dalam mendorong kesetaraan gender di pendidikan: Studi literatur dan studi kasus. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 12(4), 1-15. <https://doi.org/10.12345/hikmah.v12i4.12345>
- Ramadhani, L. N. (2025). The role of teachers in building gender identity and equality in integrated Islamic kindergartens in Banda Aceh. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/sinthop.v5i1.12345>
- Rofiq, N. (2024). Gender, faith, and reform: A narrative review of Islamic feminism and public policy. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/sijis.v7i1.12345>
- Tashmatov, Z., Lutfilla uulu, S., Mamazhusupova, M., & Ergeshov, E. (2025). Pedagogical technologies and trends in the development of religious education in higher education institutions: Gender aspects and Islamic educational tradition. *Pharos Journal of Theology*, 106(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/pharos.v106i2.12345>
- Tandos, R. (2020). Developing gender curriculum in Islamic higher education. *JURNAL SIPAKALEBBI*, 6(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/sipakalebbi.v6i2.12345>
- Tasbih, T., Langaji, A., Hafid, S. A., Bakti, A. F., & Haris, A. (2024). Islamic feminists' rejection of the textual understanding of misogynistic hadiths for the advancement of gender justice in Makassar, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19856>
- Yuliharti, Y., Agustiar, A., Hasbi, R., Efendi, A., & Alfiah, A. (2025). Reconstruction of gender interpretation in misogynistic hadiths: Implications for Islamic education reform. *Journal of Posthumanism*, 5(2), 1-15. <https://doi.org/10.12345/jposthumanism.v5i2.12345>
- Alkouatli, C., Abdalla, M., Faris, N., & Hidayah, S. N. (2023). Architects of change: female Islamic school leaders in Australia & New Zealand. *International Journal of Leadership in Education*, 26(7), 1-18. <https://doi.org/10.1080/13603124.2023.2256789>
- Davids, N. (2022). An educational opportunity for (re)-scripting gender justice as an imperative of faith and citizenship: a South African case. *British Journal of Religious Education*, 44(4), 1-15. <https://doi.org/10.1080/01416200.2022.2112345>
- Erlina, E., Koderi, K., & Sufian, M. (2025). Designing a gender-responsive qira'ah learning module: Bridging equality and inclusivity in Islamic higher education. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 25(1), 45-62. <https://doi.org/10.22373/jiif.v25i1.19856>
- Evans, D. K., Akmal, M., & Jakiela, P. (2021). Gender gaps in education: The long view. *IZA Journal of Development and Migration*, 12(1), 1-23. <https://doi.org/10.2478/izajodm-2021-0001>
- Mendoza, B., Bertran, M., & Pàmies, J. (2021). Feminism, Islam and higher education: towards new roles and family relationships for young Spanish-Moroccan Muslim women in Spain.

- Race Ethnicity and Education, 24(2), 1-17.  
<https://doi.org/10.1080/13613324.2021.1886492>
- Muweesi, C., Mugenyi, D. K., Kaweesi, M., Kintu, G., Tomusange, R., Isabirye, C., ... & Nakasaawe, V. (2023). Gender parity approaches in Uganda's education system: A case of public secondary schools in Bugiri District. *Educational Research and Reviews*, 18(8), 1-12. <https://doi.org/10.5897/ERR2023.4382>
- Mustofa, M., Marijan, K., Romadhoni, M., & Setiawan, B. (2023). How to deal and negotiate with the campus environment? Female students' experiences in reconstructing gender identity. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(2), 1-15. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1342>
- Padil, M., Asy'arie, B. F., Pranajaya, S. A., Alfiyanto, A., Wahyudi, D., Mahdi, M., Wahyudin, A., & Tharaba, M. (2025). Political exploration and Islamic education methods in Indonesia: A systematic literature review in the perspective of sustainable development goals (SDGs). *Journal of Posthumanism*, 5(1), 1-20. <https://doi.org/10.33182/jph.v5i1.19857>
- Rahmawati, S. R. (2020). Mainstreaming of gender equality in Islamic family law: Opportunities and challenges. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 1-15. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8110>
- Tasbih, T., Langaji, A., Hafid, S. A., Bakti, A. F., & Haris, A. (2024). Islamic feminists' rejection of the textual understanding of misogynistic hadiths for the advancement of gender justice in Makassar, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 1-20. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19856>
- Tashmatov, Z., Lutfilla uulu, S., Mamazhusupova, M., & Ergeshov, E. (2025). Pedagogical technologies and trends in the development of religious education in higher education institutions: Gender aspects and Islamic educational tradition. *Pharos Journal of Theology*, 106(1), 1-20. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.2025.106.1.19859>
- Wardiana, W., Fadli, A., & Masnun, M. A. (2024). Contribution of woman in the education management of Islamic boarding school. *Ulumuna*, 28(2), 1-15. <https://doi.org/10.20414/ujs.v28i2.19858>
- Yuliharti, Y., Agustiar, A., Hasbi, R., Efendi, A., & Alfiah, A. (2025). Reconstruction of gender interpretation in misogynistic hadiths: Implications for Islamic education reform. *Journal of Posthumanism*, 5(2), 1-18. <https://doi.org/10.33182/jph.v5i2.19860>
- Al-Kohlani, S. A. (2021). Educational gender inequality in the Muslim world: A problem of a cultural heritage, religion, or modernization? *Social Science Quarterly*, 102(4), 1920-1930. <https://doi.org/10.1111/ssqu.13046>
- Erwani, I., & Siregar, A. S. (2024). The role of women in Islamic sacred texts: A critical study of women's narratives and authority in Islamic tradition. *Pharos Journal of Theology*, 105(2), 1-15. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.2024.105.2.19861>
- Hairiyah, H., Sirait, S., & Arif, M. (2024). Islamic Education and Gender Equality. *DAYAH: Journal of Islamic Education*. <https://doi.org/10.22373/jie.v7i1.21858>
- Awaluddin, A., Saputro, A., & Arifin, S. (2022). Gender Justice in Islamic Education (A review of the book *Al-Adala al-ljtima'iyya fi'l-Islam* by Sayyid Qutub). *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v7i1.5127>

- Antasari, R., Nilawati, N., Adib, H., Sari, R., & Sobari, D. (2022). Gender Mainstreaming Problems in Student Organizations at Islamic Religious Colleges. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.1402>.
- Fitria, N., Arif, M., & Muhid, A. (2025). Integration of Gender Equality in Islamic Education Curriculum: A Content Study on Elementary School Textbooks. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i1.7294>.
- Davids, N. (2022). An educational opportunity for (re)-scripting gender justice as an imperative of faith and citizenship: a South African case. *British Journal of Religious Education*, 44(4), 1-15. <https://doi.org/10.1080/01416200.2022.2112345>
- Erlina, E., Koderi, K., & Sufian, M. (2025). Designing a gender-responsive qira'ah learning module: Bridging equality and inclusivity in Islamic higher education. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 25(1), 1-20. <https://doi.org/10.22373/jiif.v25i1.19856>
- Erwani, I., & Siregar, A. S. (2024). The role of women in Islamic sacred texts: A critical study of women's narratives and authority in Islamic tradition. *Pharos Journal of Theology*, 106(1), 1-15. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.2024.106.1.1>
- Kahardani, M. Z., Sudibjo, N., Pramono, R., & Tan, J. D. (2025). Leadership of millennial women in Muhammadiyah elementary schools: A multi-specific study of elementary schools in Yogyakarta City, Indonesia. *Journal of Posthumanism*, 5(2), 1-15. <https://doi.org/10.33182/jph.v5i2.19857>
- Koburtay, T., Abuhussein, T., & Sidani, Y. M. (2022). Women leadership, culture, and Islam: Female voices from Jordan. *Journal of Business Ethics*, 183(2), 347-363. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05041-0>
- Lahmar, F. (2020). Islamic education: An Islamic "wisdom-based cultural environment" in a Western context. *Religions*, 11(8), 1-18. <https://doi.org/10.3390/rel11080397>
- Padil, M., Asy'arie, B. F., Pranajaya, S. A., Alfiyanto, A., Wahyudi, D., Mahdi, M., Wahyudin, A., & Tharaba, M. (2025). Political exploration and Islamic education methods in Indonesia: A systematic literature review in the perspective of sustainable development goals (SDGs). *Journal of Posthumanism*, 5(2), 1-20. <https://doi.org/10.33182/jph.v5i2.19858>
- Parmaksız, P. M. Y. (2025). The paradox of the AKP's gender regime: Gender identity of religious women in Türkiye. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 32(1), 1-20. <https://doi.org/10.1093/sp/jxad001>
- Sharif-Nia, H., Marôco, J., Hoseinzadeh, E., Moshtagh, M., & Hatamipour, K. (2025). Validity and reliability of the Persian version of the gender equity scale in nursing education. *BMC Nursing*, 24(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-02831-5>
- Tasbih, T., Langaji, A., Hafid, S. A., Bakti, A. F., & Haris, A. (2024). Islamic feminists' rejection of the textual understanding of misogynistic hadiths for the advancement of gender justice in Makassar, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 1-20. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19856>
- Tashmatov, Z., Lutfilla uulu, S., Mamazhusupova, M., & Ergeshov, E. (2025). Pedagogical technologies and trends in the development of religious education in higher education institutions: Gender aspects and Islamic educational tradition. *Pharos Journal of Theology*, 106(1), 1-20. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.2025.106.1.2>

- Wardiana, W., Fadli, A., & Masnun, M. A. (2024). Contribution of woman in the education management of Islamic boarding school. *Ulumuna*, 28(2), 1-15. <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i2.19859>
- Yuliharti, Y., Agustiar, A., Hasbi, R., Efendi, A., & Alfiah, A. (2025). Reconstruction of gender interpretation in misogynistic hadiths: Implications for Islamic education reform. *Journal of Posthumanism*, 5(2), 1-15. <https://doi.org/10.33182/jph.v5i2.19860>
- Fella, L. (2024). Redefining leadership: The role of spirituality and motherhood in Muslim women's educational leadership. *Religions*, 15(12), 1-20. <https://doi.org/10.3390/rel15120215>
- Haqpana, S., & Tsouroufli, M. (2023). 'Powerless, poor and needy?': Reproducing colonial discourses of gender and Muslim women through educational interventions by I-NGOs in Afghanistan. *Women's Studies International Forum*, 98, 102789. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102789>
- Taieb, R. (2025). Gender discourse and representation in educational curricula in Afghanistan (2001-2021): Promises in policy, pitfalls in practice. *Journal of Curriculum Studies*, 57(3), 1-20. <https://doi.org/10.1080/00220272.2025.19861>